

Lampiran II: Daftar Hakim dan Pegawai Pengadilan yang dijerat KPK

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Tahun Kejadian/ Putusan	Lembaga yang Menindak
1.	Pragsono	hakim Pengadilan Tipikor Semarang	Uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.	2012	KPK
2.	Asmadinata	hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah	Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.	2012	KPK
3.	Setyabudi Tejocahyono	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung	menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya dari Asep ini berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Bandung.	2013	KPK
4.	Kartini Juliana Magdalena Marpaung	Hakim ad hoc Tipikor Semarang	Kartini ditangkap KPK tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.	2012	KPK
5.	Heru Kisbandono	hakim ad hoc Tipikor Pontianak	Untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.	2012	KPK
6.	Bambang Agus	Mantan staf administrasi	Menerima uang dari Heru Kisbandono hakim	2012	KPK

	Purnomo	pidana bagian pranata pidana Mahkamah Agung	ad hoc Tipikor Pontianak		
7.	Tripeni Irianto Putro	Ketua PTUN Medan	Diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan tahun 2015	2015	KPK
8.	Amir Fauzi	Hakim PTUN Medan		2015	KPK
9.	Dermawan Ginting	Hakim PTUN Medan		2015	KPK
10.	Andri Trisianto Saputra	Kasubdit Kasasi dan Perdata Mahkamah Agung	Dugaan suap Penundaan salinan putusan Kasasi Terdakwa Ichsan	2016	KPK
11.	Edy Nasution	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA	2016	KPK
12.	Muhammad Santoso	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Perkara perdata PT. Mitra Maju Sukses melawan PT. Kapuas Tunggal Persada	2016	KPK
13.	Janner Purba	Ketua PN Kepahiang	Suap dalam perkara penyalahgunaan honor pengawas dan pembina RSUD M Yunus Bengkulu	2016	KPK
14.	Toton	Hakim PN Bengkulu		2016	KPK
15.	Badarudin Bachsin	Panitera PN Bengkulu		2016	KPK
16.	Rohadi	Panitera PN Jakarta Utara	Suap dalam Perkara Saiful Jamil	2016	KPK
17.	Ike Wijayanto	Plt. Panitera Muda Hubungan Industrial bandung	Dijerat karena suap setelah pengembangan kasus suap Hakim Imas	2013	KPK
18.	Ramlan Comel	Hakim Ad Hoc Tipikor Bandung	Keduanya menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos pemkot Bandung. Hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Dada Rosada	2013	KPK
19.	Seferina Sinaga	Hakim Tinggi PT Jabar		2013	KPK
20.	Syamsir Yusfan	Panitera PTUN Medan	Bersama 3 hakim PTUN, diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan tahun 2015.	2014	KPK
21.	Sarwo Edi	Pegawai PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA yang melibatkan Edy Nasution. Mereka menerima uang yang merupakan suap kepada Edy Nasution	2016	KPK
22.	Irdiansyah	Pegawai PN Jakarta Pusat		2016	KPK
23.	Dewi Suryana	Hakim Tipikor Pengadilan Bengkulu	Suap dalam pengaturan putusan perkara korupsi. Dewi Suryana menerima 125 juta sebagai commitment fee	2017	KPK

24.	Tarmizi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Diduga menerima suap sebesar Rp425 juta dari Akhmad selaku kuasa hukum PT Aquamarine Davidson Inspection dan dari Yunus Nafik, Direktur Utama PR Aquamarine Davidson Inspection	2017	KPK
25.	Sudiwardono	Ketua Pengadilan Tinggi Manado	Diduga menerima suap terkait penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow	2017	KPK
26.	Wahyu Widya Nurfitri	Hakim Pengadilan Negeri Tangerang	Diduga menerima suap terkait pengelolaan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang dari dua orang advokat, Agus Wiratno dan HM Saipudin	2018	KPK
27.	Tuti Atika	Panitera Pengganti PN Tangerang		2018	KPK

Dokumentasi: ICW, data diolah dari berbagai sumber